

## DAFTAR RUJUKAN

- Adinda, Dwiana, dkk. (2024). Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal*, 1(1), 12–25.
- Agus Subianto. (2020). *Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. Brilliant.
- Ahmad Qorib, dkk. (2016). Penerapan Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal*, 56–57.
- Alfan, Thariq, et al. (2024). Konsep Good Governance dalam Transparansi Anggaran Dana Partai Politik Perspektif Fiqh Siyasa. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 4(1), 17–35.
- Ali, K., dan A. Saputra. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Pematang Johar. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 602–614.
- Andi Muhammad Iqbal, dan Nila Sastrawati. (2022). Tinjauan Hukum Tata Negara Islam Pendapatan Belanja Daerah. *Jurnal*, 2, 58–63.
- Ardyansyah, M. F., Syah, A. L. A., & Amalia, S. F. (2025). Maqashid Syariah dalam Kebijakan Publik: Analisis Implementasi Prinsip Islam dalam Kebijakan Pemerintah di Indonesia. *Mutaallim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(3), 227–240.
- Aulia Sholichah Iman Nurchotimah. (2021). *Pengawasan Pelayanan Publik*. Jejak Pustaka.
- Dareah, dkk. (2024). Analisis Akuntabilitas Birokrasi Publik Dalam Sistem Keuangan. *Jurnal*, 11(2), 585–592.
- Darmono. (2026, 14 April). Hasil wawancara selaku Kepala Sub Bagian Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung.

- Darmono. (2026, 14 April). Hasil wawancara selaku Kepala Sub Bagian Umum Kabupaten Tulungagung
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI. (2025). Langkah Strategis dan Tantangan Pelaksanaan Anggaran Pasca Efisiensi Berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025. *KPPN Malang*.
- Erly Sulistiyawati, dkk. (2025). Penerapan Nilai-Nilai Siyasa Syar'iyah dalam Kebijakan Publik Nasional. *Jurnal*, 3, 959–968.
- Fadilla, A. R., & Wulandari, P. A. (2023). Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data. *Mitita Jurnal Penelitian*, 1(3), 34–46.
- Habib, T. Y. S., & Zahratul Idami, S. H. (2022). Strategi Dinas Pendidikan Dayah Aceh dalam Menghadapi Kebijakan Refocusing APBA. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(1).
- Hartono, H. (2025). Urgensi Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2025 terhadap Pelaksanaan APBN di Kementerian/Lembaga Tahun 2025. *Indonesian Research Journal on Education*, 5(1), 2666–2672.
- Hevan Walizi, dkk. (2025). Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran Terhadap Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah Di Bappeda Muara Enim. *Jurnal*, 2(1), 1707–1718.
- IMEIJ: *Indonesian Management and Education International Journal*. (2024). Pengelolaan Pendidikan yang Efektif: Tantangan Keterbatasan Anggaran dan Solusinya. Indo-Intellectual.
- Izomiddin. (2023). *Falsafah Syariah Hukum Islam: Hakikat, Hikmah, Prinsip, Tujuan dan Karakteristik Hukum Islam dalam Ibadah dan Muamalah*. Kencana.
- Jatimnow.com. (2025). Pemkab Tulungagung Lakukan Efisiensi Anggaran Hingga Rp52,3 Miliar. *Jatimnow.com*.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Efisiensi Anggaran dan Alokasi Anggaran Pendidikan dalam APBN 2025. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2011) *.Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Duta Surya.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Nota Keuangan beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 Buku II*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kusnadi, H., Dinarwati, S., & Suparman, A. (2020). Kinerja Bidang Pengelolaan Pasar dalam Pemungutan Retribusi Pasar pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang. *The World of Financial Administration Journal*.
- Lorensi Putri, Utari, & Caniago, Sulastri. (2021). Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 2(2), 193.
- Mallongi, Andi Agung, et al. (2025). Kebijakan Efisiensi dalam Pengelolaan Anggaran Negara di Indonesia Tahun 2025 Ditinjau dari Perspektif Siyasah Maliyyah. *Jurnal El-Thawalib*, 6(2), 212–226.
- Malimbe, A., Waani, F., & Suwu, E. A. (2021). Dampak Penggunaan Aplikasi Online TikTok (Douyin) terhadap Minat Belajar di Kalangan Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal Ilmiah Society*, 1(1).
- Mariana, & Rahmaniar. (2024). Evaluasi Kebijakan Penganggaran Berbasis Kinerja di Pemerintah Daerah. *EKALAYA: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 2(4), 33–34.
- Mariana, & Rahmaniar. (2024). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah. *EKALAYA: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 2(4), 33–34.

- Moh. Mujibur Rohman, Nashrul Mu, & Muwafiq Ibrahim. (2024). Methodological Reasoning Finds Law Using Normative Studies (Theory, Approach, and Analysis of Legal Materials). *Jurnal*, 4(2), 204–221.
- Muannif Ridwan. (2020). Ijtihad Pada Era Kontemporer. *Jurnal Masohi*, 1(2), 110–121.
- Muhammad Fayiz Ardyansyah, dkk. (2025). Maqashid Syariah dalam Kebijakan Publik: Analisis Implementasi Prinsip Islam dalam Kebijakan Pemerintah di Indonesia. *Mutaallim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(3), 230.
- Muhammad Sawir, & A M Azhar Aljurida. (2025). Evaluasi Penerapan Governance Dalam Anggaran Daerah Prinsip Good Pengelolaan. *Jurnal*, 1(1), 1–16.
- Mustika, M., Afdillah, W., Sartika, R., & Pangestoeti, W. (2025). Transparansi anggaran publik dan implikasinya terhadap efisiensi pengeluaran pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik*, 2(4), 1245–1250.
- Nahdya Nurislamiyah, Dwi Putri, & Desy Delyana Tanjung. (2025). REALITAS SOSIAL IMPLEMENTATION OF CITIZENS' RIGHTS TO EDUCATION FROM THE. *Jurnal*, 1(2), 176–184.
- Nugroho, Agung. (2025, 24 Februari). Pakar UGM: Pemangkasan Anggaran Berpotensi Menurunkan Mutu Pendidikan hingga Kontraksi Ekonomi. *Universitas Gadjah Mada*.
- Ovaldo, Diego. (2025). *Dampak Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi dan Penghematan Anggaran Pemerintah terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Otonomi Daerah*. Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung. (2023).

- Putri, S. U., & Zikriani, N. (2025). Tinjauan Kaidah Taṣarruf al-Imām ‘alā al-Ra’iyyah Manūṭun bi al-Maṣlaḥah terhadap Kebijakan Efisiensi Anggaran dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025. *Al-Muntaqa: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, 1(1), 113–137.
- Putri Nabila, P., et al. (2025). Efektivitas audit kinerja sektor publik dalam mewujudkan *good governance*. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 1–10.
- Sangaji, dkk. (2025). Transformasi Inovasi Pelayanan Publik menuju Modernisasi Birokrasi. *Jejaring Administrasi Publik*, 17(1), 54–70.
- Samosir, M. S. (2021). Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2015–2019. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(3), 33–42.
- Siregar, K. N. (2023). *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran (Studi Kasus Dinas Pendidikan Provinsi Lampung)*. Universitas Islam Sumatera Utara.
- Soekanto, S. (2015). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press.
- Subagyo, M. (2024). *Implementasi Aplikasi Surat Digital (e-Suradi) dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suryadi, F., Pasaribu, M. H., Siahaan, A. D., Sabri, A., & Lubis, Y. (2024). Peran Manajemen Pendidikan dalam Mewujudkan Sekolah Berkualitas. *Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan dan Bahasa*, 3(4), 92–107.
- Syabran Jabar, dkk. (2024). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(12), 720–728.

- Tarmizi, Yulia Pradiba, & Usman, Karmila. (2025). Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman. *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman*, 1, 1–8.
- Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pencegahan Fraud di Instansi Pemerintah, Studi Kasus Kantor Kecamatan. (2023). *Jurnal*, 2(1).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (2014).
- Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun Anggaran 2025. (2024). *Buku I*. Sekretariat Negara RI.
- Uun Sancahya. (2026, 13 April). Hasil wawancara selaku Kepala Bidang Pendidikan SMP Kabupaten Tulungagung.
- Wahyuningsih, Y. E. (2022). Efektivitas Penyerapan Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan*, 2(5), 350–359.
- Wilujeng, Wise. (2025). Good Governance dalam Pemerintahan Indonesia: Analisis Normatif Berdasarkan Fikih Siyasa. *Islamic Law: Jurnal Siyasa*, 10(2), 203–214.
- Windasari, Ihsanul. (2024). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dalam Perspektif Islam. *Hasina: Jurnal Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 1(1), 10–25.
- Yansih, P. (2021). *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Tahun 2014–2018*. Universitas Pakuan.
- Zein, M. H. M. (2023). *Reformasi Birokrasi: Dunia Birokrasi dan Pemerintahan*. Sada Kurnia Pustaka.